

# **PIDATO KENEGARAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**S O E H A R T O**

**DI DEPAN SIDANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
16 AGUSTUS 1978**

**(PIDATO DAN LAMPIRAN)**

**DEPARTEMEN PENERANGAN RI**





*Presiden Republik Indonesia  
Soeharto*



P R E S I D E N  
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Saudara Ketua yang terhormat,  
Saudara-saudara para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat yang saya hormati;  
Hadirin dan hadirat serta Saudara-saudara se Bangsa dan  
se Tanah Air yang berbahagia,

Besok pagi adalah Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-33. Dan malam ini, kita berkumpul di sini, dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, untuk sama-sama menyambut hari yang bersejarah itu. Sambil merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan itu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang MAHAESA, yang telah menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya kepada bangsa kita, yakni kemerdekaan Tanah Air dari kekuasaan asing yang telah lama menjajah, membelenggu dan mencengkeram bangsa kita.

Dalam memperingati hari yang paling besar dalam sejarah bangsa kita itu, sudah seharusnya apabila kita semua yang masih



dianugerahi umur panjang oleh Tuhan Yang MAHAESA, sama-sama menundukkan kepala, mengenang dan menyatakan hormat kepada para pendahulu kita, segenap patriot dan pejoang Tanah Air, segenap pahlawan bangsa, baik yang dikenal maupun tak dikenal, sambil memohonkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga mereka beroleh tempat yang layak di haribaan-Nya. Marilah kita memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada mereka yang sudah tiada itu, dengan memelihara dan memperkokoh Kemerdekaan Nasional yang telah mereka tebus dengan jiwa raganya itu.

Malam ini, di hadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, saya mengajak segenap Bangsa Indonesia untuk merenung sejenak, dan menghayati kembali apakah sebenarnya makna kemerdekaan itu bagi kita semua. Walaupun kita telah merdeka semenjak 33 tahun yang lalu, namun penghayatan tersebut di atas tetap penting bagi kita yang hidup sekarang. Bahkan penghayatan tersebut haruslah tetap terpatri dalam hati sanubari kita masing-masing.

Pada saat-saat kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan seperti sekarang ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, marilah kita bertanya kepada hati nurani kita : apakah yang telah kita perbuat masing-masing untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara yang telah merdeka ini. Apakah kita telah memperkuat persatuan ataukah kita menimbulkan keretakan, apakah kita membangun kerukunan ataukah kita menyebarkan kebencian, apakah kita mendorong kemajuan ataukah kita mendesak kemunduran, apakah kita memberi lebih banyak kepada negara ataukah kita mengambilnya dari negara.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air,

Sekarang sudah 33 tahun kita merdeka. Sudah banyak liku-liku pengalaman yang kita lalui. Ada yang menyebabkan kita penuh rasa gembira dan gairah, tetapi tidak sedikit pula kita temui

hal-hal yang membuat kita cemas dan menahan napas. Bahkan mungkin, kalau kita hitung-hitung, tidak sedikit pengalaman pahit yang kita alami.

Dan dari sekian banyak pengalaman yang pahit getir itu kita harus makin menjadi dewasa sebagai Bangsa.

Memang kemerdekaan pada hakekatnya adalah suatu tantangan, disamping sebagai hak dan kesempatan yang membahagiakan. Dengan kemerdekaan itu, kita ditantang untuk mewujudkan kehidupan bangsa kita yang lebih baik dan lebih maju, lebih makmur dan lebih berkeadilan sosial.

Kita ditantang untuk mewujudkan Masyarakat Pancasila.

Sesungguhnya kemerdekaan bangsa tidaklah sekedar pergi-nya kaum penjajah dari Tanah Air kita. Dan juga bukan hanya beralihnya penguasa, dari bangsa asing ke bangsa kita sendiri. Bukan hanya itu. Dengan memproklamasikan kemerdekaan berarti kita telah merebut kembali tanggungjawab untuk melakukan pemerintahan sendiri dan untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa kita sendiri. Hal ini antara lain dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemerdekaan menuntut kita bekerja secara tekun dan ber-sungguh-sungguh. Kita tidak boleh bekerja sambil lalu dan se-paroh-separoh.

Disamping kesadaran akan tanggungjawab, kemerdekaan menuntut pula kesadaran untuk hidup berdisiplin. Kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan Nasional menuntut kemampuan kita, untuk menempatkan kepentingan diri dan golongan di bawah kepentingan bangsa dan negara. Kemerdekaan menuntut kesanggupan kita untuk hidup berkonstitusi. Semua pihak, Pemerintah maupun Rakyat berkewajiban untuk menepati ketentuan perundang-undangan yang kita tetapkan dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

Sesungguhnya, tanpa tanggungjawab bernegara kemerdekaan ini tidak akan banyak berarti, dan tanpa disiplin nasional kemerdekaan hanya akan melahirkan anarki.

Seperti telah saya katakan tadi bahwa selama 33 tahun merdeka bangsa kita telah beroleh banyak pengalaman. Dan selama itu pula, dalam pertumbuhan kita sebagai bangsa yang merdeka, kita telah mengalami peristiwa dan kejadian besar, kita telah melintasi berbagai periode sejarah.

Kita telah mengalami masa revolusi fisik. Pada waktu itu bangsa kita berjuang mati-matian, mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan dari usaha-usaha penjajah yang ingin kembali menguasai Tanah Air kita. Akan tetapi berkat kekompakan segenap potensi patriotik bangsa kita, terutama berkat kemanunggalan rakyat dan ABRI kita, akhirnya penjajah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa kita.

Kita pernah mengalami suatu masa di mana Negara Kesatuan ini berubah menjadi negara-negara bagian dalam kerangka Negara Indonesia Serikat, yang berbau kedaerahan dan kesukuan.

Kita telah mengalami masa demokrasi parlementer. Pada waktu itu kita mencoba menerapkan kehidupan politik berdasarkan paham liberal barat di negeri kita. Ternyata paham tersebut tidak sesuai dengan pola budaya bangsa kita, dan berakibat hampir-hampir memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita semua bersyukur, berkat kesadaran kita bahwa hanya dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa kita dapat hidup rukun dan bersatu, kita kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945.

Kita pernah mengalami cobaan pemberontakan-pemberontakan, yang dengan kekerasan senjata ingin merobah dasar negara kita Pancasila dengan dasar negara yang lain.

Kita pun telah mengalami masa Orde Lama yang terkenal dengan demokrasi terpimpinnya.

Demokrasi Terpimpin yang semula diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata dalam pelaksanaannya menjurus kepada arah pemujaan dan pengagung-agungan seseorang, sehingga membiarkan segala kekuasaan dengan melawan konstitusi berpusat di tangan

seorang "Pemimpin Besar". Keadaan itu sempat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh PKI waktu itu untuk menyusun kekuatan dan mengelabui rakyat yang akhirnya berpuncak pada pemberontakan G-30-S/PKI. Kita kembali sadar, bahwa penyelewengan dari falsafah dan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan membawa bangsa kita ke jurang kehancuran. Dan kita pun kembali bertekad untuk kembali ke pangkalan cita-cita perjuangan bangsa kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tekad itulah yang menjiwai kelahiran dan perjalanan Orde Baru.

Saudara Ketua yang terhormat,

Sekarang kita sudah lebih dari sepuluh tahun berada dalam zaman Orde Baru. Orde Baru lahir sebagai ketetapan hati kita untuk mengoreksi segala macam penyimpangan dari cita-cita proklamasi. Karena itu Orde Baru tidak saja harus belajar dari pengalaman di masa Orde Lama, melainkan juga dari pengalaman-pengalaman di masa-masa sebelumnya. Orde Baru juga harus berani belajar dari pengalamannya sendiri selama 12 tahun yang terakhir ini.

Apabila kita renungkan sejarah dan pertumbuhan bangsa kita selama merdeka 33 tahun ini, ternyata bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bukan sekedar pernyataan bahwa kita sudah merdeka melainkan juga bermakna dan berisi suatu cita-cita yang harus kita wujudkan menjadi kenyataan. Dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 itu –termasuk cara-cara mencapainya– telah dirumuskan dengan keramat dan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya mengapa Proklamasi 17 Agustus 1945 itu bukan sekedar peristiwa sejarah saja melainkan juga merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi bangsa kita. Dan cita-cita itu pulalah yang ingin diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh Orde Baru untuk mencapainya.

Sebagai cita-cita, maka Proklamasi 17 Agustus 1945 amanatkan kepada kita tugas sejarah yang berat, yakni mengisi

kemerdekaan bangsa kita dengan usaha-usaha pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, masyarakat Adil dan Makmur, baik dalam bidang fisik kebendaan maupun dalam bidang mental kerokhanian. Hal ini semua tertera dengan jelas dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan falsafah dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan berpemerintahan, dalam mengatur dan membangun bangsa dan negara kita.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, dan kalau perlu mempertaruhkan apa saja, untuk mewujudkan kehidupan bangsa kita dalam bernegara dan berpemerintahan sesuai dengan falsafah dan ideologi Negara : Pancasila, dan Konstitusi Negara : Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kelahirannya Orde Baru memang bertekad untuk melaksanakan kehidupan yang konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan atau peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga telah berlangsung dengan jalan konstitusional. Demikian juga segala langkah-langkah korektif untuk menertibkan situasi yang diwariskan oleh Orde Lama dulu maupun penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang hams ditempuh oleh Orde Baru. Kesemuanya ditetapkan melalui Sidang-sidang Umum/Sidang Istimewa MPR(S) waktu itu.

Sejak itu kehidupan konstitusi terus kita tumbuhkan, karena kita sadar bahwa kehidupan konstitusional adalah hal yang fundamental dalam usaha pembinaan dan pembangunan bangsa, agar bangsa ini dapat tumbuh dan berkembang dengan tertib, teratur dan berkesinambungan.

Falsafah, ideologi dan konstitusi Negara Indonesia jelas dan tegas menganut paham demokrasi, bukan saja di bidang politik melainkan juga di bidang ekonomi.

Negara kita tidak saja dibangun atas asas kedaulatan rakyat melainkan juga ditujukan pada kesejahteraan rakyat.

Itulah antara lain ciri dan isi khas demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila tidak lain adalah demokrasi yang didasarkan atas falsafah dan ideologi Pancasila, demokrasi yang kita pandang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa kita, demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Demokrasi yang mengutamakan isi dan tujuan maupun tata-cara untuk mencapai tujuan.

Memang benar bahwa gagasan demokrasi lebih bersifat universal akan tetapi belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain, dan bahkan tidak kurang pengalaman kita sendiri, pewujudan kehidupan demokrasi tidak bisa dengan cara meniru-niru bangsa lain. Sebab gagasan demokrasi tidaklah kita wujudkan dalam suatu masyarakat yang hampa budaya. Nilai dan norma yang hidup dan dihayati bangsa kita berbeda dengan nilai dan norma yang hidup dan dihayati bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu jangan sampai kita menilai kehidupan dan pertumbuhan bangsa kita dengan sistim nilai dan norma bangsa lain yang mempunyai sejarah dan kebudayaan sendiri. Kesalahan memakai ukuran nilai itulah yang seringkali membuat orang tidak bisa menghayati kemajuan yang telah dicapai oleh bangsanya sendiri.

Seperti berulang kali saya katakan bahwa demokrasi bukanlah barang jadi. Mewujudkan demokrasi tidaklah bisa satu malam jadi. Demokrasi adalah suatu proses yang memerlukan pembinaan terus menerus. Berdasarkan pengalaman maka pembinaan kehidupan demokrasi memerlukan kehati-hatian. Kita harus menjaga stabilitas nasional dan keutuhan bangsa, sebab kalau tidak, maka yang terjadi bukanlah proses makin maju melainkan sebaliknya makin mundur dalam kehidupan demokrasi. Proses makin mundur akan terjadi apabila kita tidak bisa menyasakan kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lebih dari sekedar kebebasan, inti demokrasi saya rasa, adalah keselarasan. Sebab, demokrasi memang dimaksudkan sebagai suatu sistim dan sekaligus mekanisme yang menampung dan menyalurkan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga tidak

mengakibatkan tabrakan satu sama lain di antara golongan-golongan masyarakat yang berbeda pendapat. Apalagi dengan Demokrasi Pancasila yang sedang kita kembangkan, yang jelas-jelas tidak berdasarkan faham individualisme melainkan faham kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dengan demikian, kita tidak menganggap kebebasan individu bersifat mutlak, melainkan selalu harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Di dalam kebebasan itu harus selalu melekat dengan sendirinya tanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama.

Sebagai proses maka pembinaan kehidupan demokrasi tidaklah berada pada jalan yang lempang dan datar. Walaupun begitu kita tetap berusaha membuat jalan demokrasi makin lebar dan menghindari kemungkinan membuat jalan demokrasi makin sempit. Hal inilah yang kita lakukan selama masa Orde Baru ini.

Salah satu sarana demokrasi yang utama adalah Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang dilakukan secara berkala, langsung, umum, bebas dan rahasia berdasarkan Undang-undang. Dan alhamdulillah, selama masa Orde Baru ini kita telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak dua kali untuk membentuk DPR dan MPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pemilihan Umum yang terakhir telah kita laksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang lalu. Atas dasar Pemilihan Umum tersebut kita telah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode lima tahun, 1978 — 1983. Dan seperti kita alami bersama, sebagai Lembaga Tertinggi Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menyelenggarakan Sidang Umumnya pada bulan Maret yang lalu.

Sebagai lazimnya dalam kehidupan masyarakat yang menganut faham demokrasi, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang lumrah. Dan hal itupun kita saksikan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lalu. Walaupun perbedaan pendapat tersebut menyangkut masalah yang cukup prinsipil, namun Sidang Umum telah berlangsung dan kemudian berakhir dengan sukses.

Sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila, maka betapapun besarnya perbedaan dan sengitnya perdebatan dalam dan selama Sidang Umum, namun setelah diambil keputusan bersama sesuai dengan aturan permainan menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, semua pihak terikat untuk menerima dan melaksanakannya. Dalam proses pengambilan keputusan kita boleh berbeda dan berpadu pendapat, akan tetapi setelah diambil keputusan, berakhirilah perbedaan tersebut karena keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang melembaga. Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah keputusan kita bersama yang mengikat kita semua dalam melangsungkan hidup bernegara dan berpemerintahan.

Adalah kewajiban kita semua untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan Lembaga Tertinggi Negara tersebut.

Sekarang kemauan dan kemampuan kita diuji apakah kita juga akan berhasil melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti kita telah berhasil memutuskannya. Dan tentulah semua kita menyadari bahwa melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat justru jauh lebih sukar dari menetapkannya.

Adalah tanggungjawab kita semua untuk melaksanakan segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, karena semua Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi mengandung apa yang kita cita-citakan, apa yang kita angan-angankan dan apa yang ingin kita kerjakan di masa datang.

Dan saya –selaku Presiden Republik ini-- diberi mandat untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pokok-pokok kebijaksanaan yang akan saya tempuh dalam membimbing bangsa ini dalam melaksanakan segala Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi.

Dalam kesempatan ini, saya tidak akan mengulangi lagi penilaian atas hasil-hasil yang kita capai selama ini di berbagai lapangan. Hal itu secara luas dan mendalam telah saya bentangkan

sewaktu saya menyampaikan pertanggungjawaban Mandataris kepada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret yang lalu.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air,

Lima tahun mendatang sungguh merupakan kurun waktu yang sangat menentukan perjalanan bangsa kita selanjutnya dalam mewujudkan idam-idaman kemerdekaan nasional.

Ada empat tanda-tanda sejarah mengapa kurun waktu itu menjadi demikian penting dan menentukan.

Pertama adalah, bahwa dalam waktu lima tahun mendatang —ialah pelaksanaan REPELITA III— kita berada di tengah perjalanan menuju terwujudnya landasan masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan. Seperti kita ketahui, dalam GBHN —yang ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV Tahun 1978— maka landasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu akan dapat kita wujudkan setelah kita melaksanakan serangkaian pembangunan lima tahunan sebanyak 5 — 6 kali. Dalam dimensinya sejarah, maka dalam REPELITA III itu harus tampak perspektif yang jelas, bahwa tujuan jangka panjang tadi akan dapat kita capai.

Yang kedua adalah, bahwa dalam atau pada akhir lima tahun mendatang itu akan mulai terjadi pergantian generasi. Pergantian generasi selamanya menimbulkan kerawanan-kerawanan dan sekaligus juga mengandung harapan-harapan. Pergantian generasi yang akan datang itu mempunyai arti yang khusus, sebab generasi lama yang langsung melahirkan kemerdekaan nasional ini akan berganti dengan generasi baru. Kemampuan generasi yang lama untuk menunjukkan dan meneruskan nilai yang baik dari perjuangan kemerdekaan dahulu, dan kemampuan generasi baru itu menerima secara wajar dan menghayati nilai-nilai tadi, merupakan jaminan bagi kesinambungan dan kelestarian cita-cita kemerdekaan yang menjadi sumber kekuatan dan sekaligus cita-cita nasional kita. Dan semuanya ini antara lain akan sangat ditentukan

oleh kemampuan kita semua untuk makin rnenghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tanda ketiga adalah, adanya harapan dan dimensi-dimensi baru yang diinginkan oleh rakyat dari perjalanan pembangunan kita hingga saat ini. Perasaan-perasaan rakyat menghendaki agar pembangunan ini memperoleh kedalaman-kedalaman, dan tidak hanya menyentuh permukaannya saja. Jelasnya, kita makin didesak oleh keharusan untuk makin pemeratakan pembangunan yang mengarah pada suasana dan arti keadilan sosial. Ini sungguh merupakan tantangan yang tidak ringan.

Dan tanda yang keempat adalah, bahwa dalam tahun-tahun mendatang dunia masih tetap akan diliputi oleh perkembangan dan pergeseran dalam mencari bentuk hubungan baru, baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik ataupun di lapangan pertahanan. Keadaan dan pembangunan kita tidak mungkin lepas dui pengaruh-pengaruh dunia tadi. Yang penting adalah kemampuan dan kesanggupan kita untuk mengambil sikap dan langkah yang tepat agar kepentingan nasional kita dapat kita lindungi sendiri dan keselamatan kita dapat kita jaga.

Dengan diliputi oleh kesadaran betapa pentingnya kurun waktu lima tahun mendatang itu, maka saya telah meneliti inti tugas pokok yang dibebankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Mandataris dan menetapkan sasaran-sasaran ke depan. Memperjelas tugas pokok dan sasaran ini sangat penting agar kita tahu ke mana kita bergerak, apa yang ingin kita kerjakan dan apa yang ingin kita capai.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 maka kepada Presiden/Mandataris MPR ditugaskan dalam waktu 5 tahun mendatang untuk :

- a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun III dalam rangka Garis-garis Besar Haluan Negara;
- b. Meneruskan menertibkan dan mendayagunakan Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan;

- c. Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;
- d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan Nasional.

Disamping itu Ketetapan MPR Nomor II tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Ketetapan MPR Nomor IV tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor VII tentang Pemilihan Umum telah memberikan penugasan secara khusus kepada Presiden/Mandataris untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan tersebut sebaik-baiknya.

Dalam pada itu menurut GBHN, maka pelaksanaan pembangunan dalam REPELITA III nanti haruslah tetap didasarkan atas kebijaksanaan yang berlandaskan kepada TRILOGI Pembangunan, yaitu : pemerataan pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terbinanya stabilitas nasional.

Dengan memperhatikan tugas-tugas yang dibebankan kepada Presiden/Mandataris itu tadi dan setelah saya meneliti semua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978, setelah saya berusaha memahami pikiran-pikiran yang berkembang selama Sidang Umum yang baru lalu itu dan setelah saya renungkan apa yang dipikirkan dan apa yang diharapkan oleh rakyat, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dalam lima tahun mendatang, ada tujuh sasaran yang harus diusahakan untuk dicapai, yang kemudian saya beri nama Sapta Krida Kabinet Pembangunan III.

Ketujuh sasaran itu adalah :

- pertama : Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh Rakyat dengan makin pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
- kedua : Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- ketiga : Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap;

- keempat : Terciptanya aparaturnya negara yang makin bersih dan berwibawa;
- kelima : Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang makin mendalam;
- keenam : Terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan demokrasi Pancasila;
- ketujuh : Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Sapta Krida adalah sasaran nasional kita bersama, yang juga menjadi program umum Kabinet Pembangunan III dalam lima tahun mendatang ini. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu digariskan kebijaksanaan yang menyeluruh dan terpadu sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pemerintah dan segenap aparaturnya secara keseluruhan dan bahkan juga harus didukung dan dilaksanakan bersama oleh seluruh masyarakat.

Saudara Ketua yang terhormat,

Krida pertama, kedua dan ketiga, yang tidak lain adalah TRILOGI Pembangunan yang telah ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1978, akan merupakan landasan dalam menyiapkan REPELITA III yang pokok kerangkanya nanti akan saya uraikan.

Ketiga unsur dari TRILOGI Pembangunan merupakan unsur yang lama penting dan bobotnya. Karena itu ketiga-tiganya harus kita kembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

Namun berdasarkan perasaan yang tumbuh di hati rakyat, dan dari suasana batin yang tumbuh dalam Sidang Umum MPR bulan Maret yang lalu, maka pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan sosial hams makin jelas wajahnya. Maka

krida pertama ini akan lebih nyata kita usahakan perwujudannya melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan dalam REPELITA III nanti.

Demikian pula krida kedua : Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, harus diusahakan tercapai melalui pelaksanaan REPELITA III serta kebijaksanaan ekonomi yang mendukungnya.

Sudah jelas bahwa kita tidak mungkin melaksanakan pembangunan dengan sukses, tanpa terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. Oleh karena itulah krida ketiga inipun haruslah diusahakan agar berhasil, bersama-sama dengan krida-krida yang lain.

Demikian pula pembangunan tidak akan berjalan lancar dengan optimal, tanpa aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Karena itulah krida keempat juga merupakan sasaran yang harus terus kita laksanakan, sekaligus merupakan bagian daripada pelaksanaan pembangunan sektor aparatur negara itu sendiri.

Demikian juga tanpa persatuan dan kesatuan yang kokoh tidak mungkin terciptakan stabilitas politik dan keamanan yang mantap, yang dengan sendirinya tidak memungkinkan pelaksanaan pembangunan secara berhasil. Dan memperkokoh persatuan dan kesatuan itu sekaligus perlu dilakukan dengan melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, agar dapat terbina persatuan dan kesatuan yang benar-benar lestari. Justru itulah maka krida kelima ini juga tidak terpisahkan dari usaha-usaha mensukseskan pembangunan dan melestarikan kehidupan bangsa yang bersatu padu.

Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam tahun 1982 yang akan datang juga merupakan salah satu krida kita, karena suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum itu nanti akan dapat makin memperkokoh pertumbuhan kehidupan demokrasi dan konstitusi kita yang juga merupakan bagian daripada pembangunan bangsa kita.

Akhirnya krida ketujuh, ialah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional

dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, juga akan turut menentukan kelancaran dan berhasilnya pembangunan nasional.

Jelaslah bahwa Sapta Krida merupakan kebulatan program untuk melaksanakan Ketetapan-ketetapan MPR hasil Sidang Umum MPR yang lalu, yang terpadu dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan untuk mensukseskan pelaksanaan REPELITA II sekarang ini, maupun dan terutama dalam REPELITA III yang akan datang.

Berikut ini akan saya uraikan pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan dan mencapai Sapta Krida itu, termasuk kerangka REPELITA III, yang berisi pokok-pokok kebijaksanaan pemerataan pembangunan (krida kesatu) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (krida kedua).

Mengenai krida ketiga –ialah memantapkan stabilitas nasional– maka sepanjang mengenai stabilitas politik, langkah yang penting untuk mewujudkan stabilitas politik itu adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat dalam arti yang positif, terutama kesadaran akan kehidupan demokrasi yang bertanggungjawab dan kesadaran hidup bernegara secara teratur berdasarkan konstitusi, seperti yang tadi telah saya singgung. Dalam hal ini perlu saya tegaskan, bahwa apabila Pemerintah mengusahakan sekuat tenaga terwujudnya stabilitas nasional --dalam hal ini khususnya stabilitas politik–, maka ini sama sekali bukanlah ada niat Pemerintah untuk sekedar ingin mempertahankan kekuasaannya. Juga bukan merupakan dalih bagi Pemerintah untuk menekan masyarakat dan mematikan demokrasi. Juga tidak ada niat Pemerintah untuk mempertahankan status quo, karena mempertahankan status quo berlawanan dengan watak pembangunan yang selalu bergerak dan berubah maju.

Stabilitas nasional yang kita inginkan, tetap harus memberi ruang gerak bagi perubahan. Dengan kata lain : suatu stabilitas yang dinamis. Namun sesuai dengan demokrasi kita yang bertanggungjawab dan tekad kita untuk mengembangkan kehidupan konstitusional yang kuat, maka segala macam perubahan –juga pergantian pemerintahan– harus terjadi dalam suasana yang tertib

dan teratur sesuai dengan peraturan permainan yang kita sepakati bersama, berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Satu-satunya jaminan untuk ketertiban dan keteraturan jalannya pemerintahan negara adalah pelaksanaan dari konstitusi. Didalam konstitusi itu ditegaskan bagaimana pemerintahan kita ini dibentuk, diatur dan menjalankan tugasnya. Di sana ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, penjelmaan kedaulatan rakyat. Majelis inilah yang memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Dan Presiden inilah yang membentuk pemerintahan, tegasnya membentuk Kabinet, dengan mengangkat Menteri-menteri. Presiden bukanlah diktator, ia terikat oleh GBHN dan putusan-putusan MPR. Dalam tugasnya, ia diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden berwajib melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan jika Dewan Perwakilan Rakyat —yang seluruh anggotanya menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu-- sungguh menilai bahwa Presiden menyimpang dari GBHN atau Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan persidangan istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Dengan demikian maka pergantian pemerintahan —dalam hal ini Presiden— menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, dapat terjadi setiap lima tahun berdasarkan pemilihan dan ketetapan MPR yang mengadakan sidang umum setiap lima tahun sekali. Atau : apabila Presiden dicabut mandatnya oleh MPR dalam suatu Sidang Istimewa. Sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar seorang Presiden dapat dipilih kembali oleh MPR setelah masa jabatannya berakhir. Itulah mekanisme kepemimpinan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanisme yang demikian itulah yang telah kita laksanakan selama Orde Baru ini dan harus dapat terus kita tumbuhkan. Dalam pada itu, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden menerima atau dapat

meminta nasehat-nasehat dari Dewan Pertimbangan Agung. Di samping itu kita juga memiliki kekuasaan Kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Kita memiliki pula Badan Pemeriksa Keuangan, yang juga terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, untuk memeriksa apakah uang belanja negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah digunakan sepadan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Lembaga-lembaga tertinggi/tinggi negara itu dalam Orde Baru ini telah dapat terbentuk dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Saya sengaja mengajak kembali kita semua untuk mendalami tata cara dasar pengendalian negara ini pada puncak-puncak pemerintahan seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar tadi, agar kita semua jelas dan tidak ragu-ragu lagi bahwa kita sekarang ini benar-benar telah melaksanakan kehidupan konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan terlaksananya kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu, memang terjaminlah keteraturan dan stabilitas pemerintahan.

Stabilitas nasional adalah salah satu prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan. Dan dalam stabilitas nasional ini maka stabilitas pemerintahan merupakan unsur yang penting. Pemerintah yang tergoncang, Pemerintah yang terombang-ambing, Pemerintah yang lemah, pasti tidak akan mampu membina masyarakat yang baik. Dan jangan dilupakan bahwa terwujudnya stabilitas nasional dan stabilitas pemerintahan itu merupakan petunjuk yang diberikan oleh GBHN, baik GBHN yang lama maupun GBHN yang baru. Karena itu jika stabilitas nasional terwujud, maka ini berarti apa yang diamanatkan oleh GBHN telah dapat kita laksanakan.

Untuk kuatnya stabilitas nasional dan kuatnya pemerintahan tidaklah berarti menghilangkan kontrol terhadap Pemerintah, baik oleh lembaga-lembaga konstitusional maupun oleh masyarakat.

Stabilitas politik itu terwujud justru karena semua aspirasi

masyarakat, semua keinginan-keinginan masyarakat dan pikiran-pikiran masyarakat telah tertampung dalam wadah-wadah dan saluran demokrasi yang ada. Dalam masyarakat kita yang majemuk ini tentu saja aspirasi, keinginan dan pemikiran-pemikiran itu sangat banyak. Malahan berbeda-beda.

Tetapi kita selamanya sadar bahwa demokrasi ini adalah untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kebersamaan kita yang makin kokoh. Tidak sebaliknya.

Karena itu, yang penting adalah mencapai keselarasan dan kesepakatan.

Dalam kerangka itu kita semua wajib memberi bobot dan peranan yang tinggi kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat kita. Ke dalam lembaga perwakilan rakyat inilah segala aspirasi, keinginan dan pemikiran politik harus kita tuangkan. Lebih-lebih lagi, karena memang untuk itulah kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk mengawasi Pemerintah dalam melaksanakan GBHN. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan negarawan-negarawan kita ini, yang mewakili seluruh lapisan dan kekuatan masyarakat kita dari seluruh pelosok Tanah Air, yang terhimpun dalam fraksi-fraksi Partai-partai Politik, Golongan Karya dan ABRI boleh beradu gagasan dan pikiran mengenai apa yang kita anggap baik bagi kita semua. Karena itu Dewan Perwakilan Rakyat --dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat-- sebagai lembaga-lembaga konstitusional harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ini adalah tugas kita semua. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat harus dapat menampung dan menyaring suara hati nurani rakyat. Dengan demikian segala aspirasi, keinginan dan harapan-harapannya --juga segala kekecewaan dan kegelisahannya-- dapat ditampung dan disalurkan secara demokratis dan konstitusional.

Sungguh, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan pendapat dengan jalan yang baik. Malahan harus dapat menyalurkan kekecewaan atau kegelisahannya menjadi kekuatan baru untuk penyegaran dan perbaikan.

Kita harus sudah sampai pada tingkatan ini. Sebab 33 tahun merdeka dengan kekayaan pengalaman kita yang cukup, sungguh sudah membawa bangsa kita melampaui masa kekanak-kanakannya.

Kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada pemimpin-pemimpin kekuatan sosial, kepada semua saja yang menginginkan pertumbuhan demokrasi kita yang sehat, saya ajak untuk bersama-sama menggunakan cara-cara tadi, sebagai wujud tanggung jawab bersama demi kemajuan dan kesejahteraan kita semua. Cara-cara lain, cara-cara yang tidak demokratis, cara-cara yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan hukum bukan saja tidak memecahkan persoalan, akan tetapi malahan akan mengundang ketegangan dan kekacauan.

Disamping lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga demokrasi kita juga mengenal jalur-jalur demokrasi lain yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar maupun disediakan oleh Undang-Undang, khususnya dalam menjalankan kontrol sosial terhadap Pemerintah. Dalam jalur ini kita semua perlu bersama-sama membina dan mengembangkan pers yang sehat, dalam arti pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers hendaknya dapat benar-benar menjunjung tinggi martabat dan tanggung jawab kemasyarakatannya, tanggung jawabnya terhadap persatuan dan pembangunan bangsanya.

Bersamaan dengan itu kreativitas masyarakat terus kita kembangkan, antara lain dengan memberi saluran yang tepat bagi kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab ke arah yang konstruktif bagi pembangunan, khususnya bagi dunia cendekiawan dan perguruan tinggi. Kita semua berharap agar lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan para cendekiawan dapat juga mempertahankan martabat keilmuannya, dan tidak merendahkan diri menjadi tempat berkecamuknya desas-desus dan isapan jempol. Tidak disangsikan lagi bahwa Pemerintah mempunyai kepentingan dan memikul tanggung jawab akan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan mimbar akademis yang demikian tadi, karena dari sanalah lahir kreativitas dan pemikiran baru yang

segar dan masuk akal mengenai apa yang baik bagi kita semua. Pemerintah juga memerlukan dan menghargai kritik yang membangun. Karena dengan kritik itu Pemerintah dapat meluruskan kembali apa yang tidak lurus, Pemerintah dapat melihat apa yang mungkin selama ini tidak terlihat. Sungguh pembangunan bangsa dan negara kita terlalu besar untuk hanya dipikul Pemerintah di atas pundaknya sendiri tanpa keikutsertaan dan tanpa pengawasan masyarakat luas.

Untuk mengembangkan dinamika yang stabil dan untuk membina stabilitas yang dinamis, maka kita perlu terus menerus mengembangkan komunikasi sosial timbal balik yang jujur dan obyektif, baik antara masyarakat, antara masyarakat dengan Pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dalam hubungan ini perhatian utama harus diberikan kepada generasi muda yang dalam waktu dekat akan menggantikan generasi yang lebih tua sekarang ini.

Sidang yang saya hormati;

Erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas nasional adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban, yang juga merupakan prasyarat bagi kelancaran pembangunan. Keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri juga merupakan tujuan pembangunan, ialah agar kita semua merasakan keamanan lahir dan ketenteraman batin, bebas dari ketakutan akan ancaman dari luar dan bebas dari kecemasan akan gangguan dari dalam.

Dalam garis besarnya masalah keamanan saat ini cukup baik. Sedangkan dalam bidang ketertiban masih banyak yang harus kita tingkatkan. Persoalan pokok kita adalah bagaimana agar dalam kerangka keamanan nasional yang mantap itu kita tetap dapat memberi ruang gerak bagi kebebasan dan kreativitas. Jelasnya memberi dinamika dalam kestabilan. Pembangunan nasional pada hakekatnya mencakup bidang kesejahteraan nasional dan keamanan nasional, yang kedua-duanya sangat erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Keberhasilan pembangunan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan nasional itu akan sangat

tergantung oleh kemandapan keamanan; sedangkan sebaliknya, kemandapan keamanan akan lebih berhasil jika didukung oleh keadaan masyarakat yang sejahtera.

Masalah keamanan dan ketertiban adalah masalah kita bersama, masalah dan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Karena itu dalam tahun-tahun mendatang akan terus dibina dan didorong rasa tanggung jawab keamanan dan ketertiban ini di kalangan masyarakat sendiri. Makin tinggi kesadaran dan tanggung jawab masyarakat tentang pembinaan ketertiban dan keamanan, maka makin kurang timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, dan dengan demikian alat-alat keamanan dapat memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah keamanan yang memang tidak mungkin ditanggulangi oleh masyarakat.

Dalam masyarakat kita yang makin terbuka, dalam suasana perebutan pengaruh di dunia yang belum mereda, dalam masyarakat kita yang belum lagi mampu melenyapkan pemikiran-pemikiran ekstrim, maka kewaspadaan terhadap segala bentuk infiltrasi, subversi dan tindakan destruktif lainnya masih perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini perlulah kita miliki Undang-undang Keamanan Nasional sebagai sarana hukum yang memadai untuk mencegah dan mengambil tindakan yang cepat dan praktis terhadap pelaku kejahatan di bidang ini.

Perhatian khusus juga perlu kita berikan kepada peningkatan kewaspadaan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembebasan tahanan G-30-S/PKI yang besar jumlahnya dalam tahun-tahun mendatang ini.

Demikianlah beberapa hal pokok yang berkenaan dengan krida ketiga.

Mengenai krida keempat, yakni terciptanya aparatur yang makin bersih dan berwibawa, jelas harus kita laksanakan. Kita radar, bahwa hanya aparatur yang bersih akan dapat membina masyarakat yang teratur, dan hanya aparatur yang berwibawa akan mendapatkan dukungan yang kreatif dari masyarakatnya.

Aparatur yang bersih dan berwibawa akan mendatangkan rasa tenteram di hati masyarakat dan akan mampu membangkitkan ke-gairahan masyarakat, yang keduanya merupakan tujuan tersendiri dan sekaligus kekuatan bagi pembangunan. Aparatur yang bersih dan berwibawa juga merupakan kekuatan yang ampuh untuk menegakkan disiplin nasional, yang merupakan syarat bagi pertumbuhan bangsa yang kokoh dan membangun.

Untuk itu penyempurnaan-penyempurnaan yang selama ini telah dilakukan akan dilanjutkan : baik penyempurnaan di bidang kelembagaan, kepegawaian maupun tata laksana. Saya tahu, masih ada sorotan yang tajam terhadap kejujuran aparatur kita. Namun saya perlu mengingatkan, jangan sampai ada pandangan bahwa seluruh aparatur ini sudah bobrok. Memang, di antara sekian banyak petugas yang demikian besar jumlahnya tentu saja ada yang tidak berdisiplin, yang tidak jujur, yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yang menyalah gunakan kekuasaan dan perbuatan-perbuatan lain yang dicela oleh masyarakat. Akan tetapi, masih jauh lebih banyak lagi petugas-petugas yang melaksanakan tugasnya dengan penuh kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab.

Untuk melanjutkan mengambil tindakan penertiban terhadap unsur-unsur aparatur yang negatif itu, maka Operasi Tertib yang akhir-akhir ini dilancarkan, akan terus dilaksanakan. Ini merupakan tindakan nyata dan kesungguhan Pemerintah untuk mewujudkan kebersihan dan menegakkan kewibawaannya.

Dalam rangka ini saya telah memberi instruksi kepada para Menteri dan pimpinan instansi Untuk bersikap peka terhadap keluhan dan sorotan masyarakat yang banyak dimuat dalam pers sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Sementara itu kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah yang telah digariskan, khususnya mengenai pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta dan kesederhanaan hidup, akan makin ditingkatkan pengawasannya dan akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Untuk makin meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam pengabdian kepada tugasnya, maka setiap petugas, setiap pegawai negeri perlu mengetahui apa yang dihasilkan oleh Sidang Umum MPR yang lalu yang menjadi tugas Pemerintah untuk melaksanakannya. Untuk itu kepada seluruh pegawai negeri akan diberikan penataran mengenai hasil-hasil Sidang Umum MPR itu khususnya mengenai GBHN dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Sekarang izinkan saya, Saudara Ketua yang terhormat, untuk menjelaskan kebijaksanaan mengenai krida kelima, ialah terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh, yang dilandasi oleh "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" atau yang sekarang telah terkenal dengan sebutan P4.

Usaha untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini sama sekali tidak boleh dikendorkan. Belajar dari pengalaman kita selama ini, sadar akan kemajemukan bangsa kita, sadar pula bahwa dalam tahap-tahap pembangunan yang akan datang dinamika masyarakat kita akan bertambah besar dan cepat, maka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap memperoleh perhatian dan penanganan yang terus menerus. Dalam rangka ini maka penghayatan dan pengamalan Pancasila amat mendesak, karena pandangan hidup kita yang berdasarkan Pancasila inilah yang mampu mempersatukan cita-cita dan menjadi semen pengikat bangsa kita yang sangat majemuk ini, mampu memelihara kelestarian hidup bangsa kita berdasarkan cita-cita Proklamasi dan mampu memberi arah yang benar pada pembangunan kita di masa-masa datang. Disamping itu kita juga harus waspada terhadap segala kemungkinan situasi internasional dalam tahun-tahun yang akan datang, khususnya terhadap pengaruh-pengaruh dari luar, dan terhadap infiltrasi ideologi lain yang berkedok janji-janji kehidupan yang lebih baik. Kita juga harus sadar akan pergantian generasi yang sudah bukan terjadi dalam tahun-tahun mendatang itu.

Sebagai pandangan hidup dan falsafah negara, Pancasila memang harus kita hayati dan kita amalkan, karena Pancasila

harus dapat memberi arti kepada kehidupan nyata kita sehari - hari.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kuat rasa keagamaannya dan memeluk berbagai agama. Dalam hubungan ini, maka pelaksanaan P4 akan makin membuat subur dan semaraknya kehidupan keagamaan dalam masyarakat kita yang berdasarkan Pancasila, yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Saya tidak perlu lagi berpanjang lebar mengenai isi "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" ini, lebih-lebih karena hal itu telah dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II Tahun 1978. Di sana antara lain ditegaskan bahwa Presiden atau Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mengusahakan agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan amanat Majelis itu saya telah menunjuk sebuah Team Penasehat Presiden mengenai pelaksanaan P4, yang kemudian terkenal dengan Team P7, yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa kita dan diketuai oleh Saudara Dr. H. Roeslan Abdulgani. Team P7 ini sekarang sedang melaksanakan tugasnya, mengumpulkan bahan dan pendapat, dan telah pula mengadakan hubungan dengan berbagai kalangan, baik di kalangan Pemerintahan maupun di kalangan masyarakat ataupun dari berbagai kalangan yang ahli. Konsultasi-konsultasi seperti itu sangat penting karena pelaksanaan P4 harus dilakukan dengan persiapan yang masak dan tidak boleh dilaksanakan secara gegabah.

Sasaran pelaksanaan P4 adalah perorangan, keluarga dan masyarakat baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat bekerja. Apabila setiap perorangan telah mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila, maka ia akan dapat mengoreksi dirinya sendiri dan mengoreksi masyarakatnya apakah sudah sesuai dengan Pancasila atautkah belum.

Sungguh, Pancasila sama sekali bukan hanya untuk diucapkan dan dibicarakan, bukan hanya untuk dikaji secara ilmiah, melainkan yang lebih penting adalah diamalkan.

Saya menyadari bahwa pelaksanaan P4 tidak cukup hanya melalui penyebaran luasan pengertiannya, akan tetapi juga akan di-

tentukan oleh keadaan sekitar. Karena itu Pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan keadaan politik, ekonomi, sosial budaya yang memperlancar pelaksanaan P4 ini. Saya juga sadar, bahwa aparatur pemerintahan sebagai panutan masyarakat haruslah pertama-tama yang secara sungguh-sungguh memahami dan melaksanakan P4. Karena itu dalam waktu dekat ini –seperti tadi telah saya katakan-- akan diadakan penataran bagi seluruh pegawai Republik Indonesia di seluruh wilayah Tanah Air. Ini adalah langkah permulaan, karena penyebar luasan P4 ini harus meliputi seluruh lapisan masyarakat. Kita malahan perlu memiliki kader-kader Pancasila. Dalam rangka ini, dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari Team P7, pada saatnya akan saya bentuk Badan Pelaksana Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat BP7) yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan kader Pancasila dari masyarakat luas.

Pendeknya, P4 harus membudaya dalam masyarakat.

Saudara Ketua yang terhormat, Sidang yang mulia ;

Mengenai krida keenam, ialah terlaksananya Pemilihan Umum pada tahun 1982 dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila, maka seperti telah saya singgung di muka, Pemilihan Umum adalah mutlak diadakan secara berkala (setiap lima tahun) baik sebagai perwujudan dari kehidupan Bangsa yang demokratis, maupun untuk menegakkan mekanisme kepemimpinan nasional yang berdasarkan konstitusi.

Meskipun pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang itu masih agak lama, yaitu pada tahun 1982, namun persiapan-persiapannya memang perlu disiapkan dari sekarang, terutama untuk menciptakan suasana dan keadaan agar pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1982 dapat berjalan lebih tertib, lancar dan aman. Kita malahan perlu mengembangkan sopan santun politik yang baik, untuk mencegah ekses-ekses dan suasana yang tegang dan panas menjelang terselenggaranya Pemilihan Umum nanti.

Sementara itu persiapan lain yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan-perbaikan atas peraturan perundang-undangan

Pemilihan Umum yang sekarang kita miliki, dengan mengambil pelajaran dari Pemilihan Umum yang sebelumnya telah kita laksanakan. Dewasa ini Pemerintah sedang menyusun perbaikan-perbaikan peraturan-peraturan itu dengan memperhatikan pendapat dari semua pihak : dari Partai Politik dan Golongan Karya.

Sekarang, Saudara Ketua yang terhormat, saya akan beralih kepada pikiran-pikiran kita mengenai masalah-masalah luar negeri dan apa yang akan kita kerjakan. Di sini saya berbicara tentang krida ke tujuh dari Sapta Krida Kabinet Pembangunan.

Dunia sekarang tetap ditandai oleh pergeseran-pergeseranimbangan di lapangan politik, ekonomi dan militer sebelum mencapai tata hubungan baru yang lebih mantap. Harap-harap cemas masih meliputi Timur Tengah. Pendekatan yang berkembang dari pertemuan bersejarah antara Presiden Sadat dan Perdana Menteri Begin di Yerusalem dan Ismailia sembilan bulan yang lalu, akhir-akhir ini nampaknya mendekati jalan buntu. Dunia kini diberi harapan baru dengan rencana Pertemuan Puncak di Camp David bulan depan. Kita mengharapkan agar pertemuan ini dapat merintis jalan baru ke arah penyelesaian yang adil, sehingga di Timur Tengah terbentang landasan bagi perdamaian.

Dalam keadaan dunia yang demikian maka segala kemungkinan bisa terjadi. Kelegaan hati kita setelah berakhirnya perang di kawasan Indocina ternyata tidak terlalu lama, karena kini di kawasan itu timbul ketegangan-ketegangan baru yang dapat semakin rumit karena masuk pula kepentingan-kepentingan kekuatan besar dunia. Perkembangan yang terjadi di sana tentu akan mempengaruhi perkembangan di Asia Tenggara. Sementara itu di benua Afrika juga tumbuh ketegangan-ketegangan dan benih-benih konflik baru, dan yang juga dapat menjadi gawat karena masuknya kepentingan dan kekuatan-kekuatan besar. Perang dingin yang selama tahun-tahun terakhir ini agak menyejukkan dunia, kini ada tanda-tanda akan menghangat lagi.

Dalam keadaan dunia yang demikian itu tampil kembali perlunya gerakan non blok. Namun dengan rasa prihatin harus kita akui bahwa gerakan non blok kini sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit, karena timbulnya gejala keretakan dan benih-benih perpecahan, juga karena berhasilnya menyusup kepentingan kekuatan-kekuatan besar ke dalamnya. Sebagai salah satu pendiri gerakan non blok maka Indonesia terus berusaha sekuat tenaga

agar sebanyak mungkin anggota non blok ini dapat tetap bertahan pada tujuan semula gerakan ini, ialah untuk memberi sumbangan yang bermanfaat bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, dan tidak membiarkan dirinya menjadi ujung-ujung tangan kekuatan-kekuatan besar yang sedang bersaing.

Dalam keadaan dunia yang demikian itu, politik luar negeri harus kita kemudikan dengan lincah, waspada dan berhati-hati. Seperti yang ditegaskan dalam GBHN, pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif itu terus kita abdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Kita memberi tekanan penting pada masalah-masalah ekonomi, karena pembangunan ekonomi inilah yang merupakan tugas nasional kita yang paling besar dewasa ini. Dalam hubungan ini kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara maju yang selama ini ditempuh akan dilanjutkan, yang akan dimanfaatkan secara optimal sebagai pelengkap sumber-sumber pembangunan kita.

Di panggung perjuangan ekonomi dunia, kita berjuang untuk mewujudkan keadilan ekonomi internasional dan pembangunan negara-negara yang sedang membangun, dalam kerangka besar pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru. Karena itu kita mengajak seluruh dunia ketiga untuk menyatukan gagasan, kekuatan dan langkah bersama agar keadilan ekonomi dunia benar-benar menjadi kenyataan. Tanpa ini maka negara yang telah maju akan makin maju, dan negara yang masih terbelakang akan tetap terbelakang.

Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang membangun banyak dipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia. Jelasnya, keadaan ekonomi dan pembangunan kita banyak dipengaruhi oleh naik turunnya harga bahan mentah di pasaran dunia. Karena itu kestabilan harga bahan mentah pada tingkat yang layak merupakan salah satu perjuangan kita. Perjuangan yang penting ini telah mencapai titik-titik terang, ialah dengan adanya kesepakatan dari negara-negara industri untuk membentuk suatu "Dana Bersama" guna membiayai cadangan bahan-bahan mentah tertentu yang diekspor oleh negara-negara yang sedang membangun. Hasil yang kita capai ini barulah langkah awal dari perjuangan yang terang masih akan panjang. Hasil perjuangan ini

kita jadikan pangkal tolak untuk giat berjuang lebih lanjut. Setiap forum yang ada kita gunakan untuk menegaskan keadilan ekonomi internasional, misalnya dalam dialog Utara-Selatan antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang membangun, dalam Konferensi-konferensi UNCTAD dan dalam Kelompok 77.

Di samping itu kita juga terus memelihara persatuan dan solidaritas kita dengan negara-negara pengeksport minyak bumi lainnya dalam rangka OPEC. Kita mengetahui bahwa minyak bumi merupakan salah satu sokoguru dari pembangunan ekonomi kita sekarang ini. Naik turunnya produksi dan harga minyak bumi tentu akan besar pengaruhnya terhadap jalannya' roda pembangunan kita. Karena itu menjadi kewajiban kita untuk memelihara ke-mantapan harga dan produksi agar kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam kita ini.

Sementara itu kita juga terus mengembangkan kerjasama dan hubungan ekonomi kita ke luar. Kita terus berusaha meningkatkan ekspor kita di luar minyak bumi dan juga mencari pasaran-pasaran baru. Dalam rangka ini kita telah mulai meluaskan kerjasama dan hubungan ekonomi ke negara-negara Timur Tengah dan juga ke negara-negara sosialis.

Dalam pada itu pusat perhatian politik luar negeri kita tertuju pada pemeliharaan stabilitas regional Asia Tenggara, melalui kerjasama dilingkungan ASEAN. Ini adalah salah satu tiang politik luar negeri kita yang sangat penting. Benteng utama kesejahteraan dan ketenteraman kita adalah kerjasama yang erat dan persaudaraan di antara tetangga kita sendiri. Karenanya memperkokoh organisasi ASEAN dan mengisinya dengan kerjasama yang efektif akan terus diusahakan. Saya menilai bahwa masa-masa penyesuaian telah dapat kita lampau dalam pertumbuhan ASEAN, dan kini telah tiba pada masa konsolidasi dengan memperbanyak kerjasama di segala lapangan.

Demikian pula hubungan kita dengan negara-negara tetangga di sebelah selatan dan timur juga terus bertambah erat, khususnya dengan Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini. Dengan negara-negara tersebut kita terus berusaha untuk mengembangkan kerja-

sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan dan saling dibutuhkan.

Sidang Dewan yang saya hormati;

Sekarang sampailah saya pada penguraian mengenai pokok-pokok kerangka REPELITA III, yang mencakup masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (krida kesatu) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (krida kedua).

Berlandaskan GBHN yang ditunjukkan oleh Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1978, maka tahap pembangunan ketiga dari rangkaian pembangunan jangka panjang kita ini harus merupakan kelanjutan dan peningkatan dari tahap pembangunan kedua yang saat ini memasuki tahun terakhir pelaksanaannya. Karena itu penyusunan dan persiapan REPELITA III tidak dapat lain harus dilandaskan kepada keadaan realitas sekarang ini dan perkiraan keadaan ekonomi nasional dan internasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Sebagai kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA II yang sekarang, maka dalam usaha mencapai sasaran-sasaran dalam REPELITA III nanti, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik dan berhasil dalam REPELITA II ini dengan sendirinya akan diteruskan dan kalau mungkin ditingkatkan.

Dalam pada itu kita harus pandai-pandai belajar dari pengalaman masa-masa yang lalu agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang sama yang merugikan pembangunan.

Sudah barang tentu, untuk memungkinkan meningkatkan pembangunan yang harus mampu memenuhi tuntutan-tuntutan baru dalam REPELITA III nanti, akan ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program baru sepanjang keadaan memungkinkan dan tersedia sumber-sumber dana yang dapat mendukungnya.

Dengan berlandaskan pada hal-hal pokok itu, maka disusunlah pokok-pokok kerangka REPELITA III.

Berlandaskan kepada GBHN maka tujuan REPELITA III seperti halnya REPELITA-REPELITA sebelumnya adalah dua segi, ialah: meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh Rakyat yang makin merata dan adil, dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dan seperti tadi telah saya singgung, maka sesuai dengan GBHN, kebijaksanaan pembangunan dalam REPELITA III akan terus dilandaskan pada TRILOGI Pembangunan, dengan tekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial.

Asas pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, yang antara lain meliputi :

- (1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
- (2) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- (3) Pemerataan pembagian pendapatan;
- (4) Pemerataan kesempatan kerja;
- (5) Pemerataan kesempatan berusaha;
- (6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;
- (7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air;
- (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Mengenai pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan sandang, maka usaha-usaha yang dilakukan ialah menjamin persediaan bahan pokok secara merata dalam jumlah yang mencukupi dan dalam harga yang terjangkau oleh rakyat banyak. Dalam pada itu berbagai langkah akan diambil agar ada kemampuan bagi rakyat untuk membeli bahan kebutuhan pokok tadi dengan penghasilan yang diperolehnya. Di lain pihak terus juga diusahakan agar penghasilan para

petani produsen bertambah baik. Produksi akan dinaikkan dengan peningkatan produktivitas per hektar tanah maupun perluasan areal tanaman. Penggunaan pupuk akan dinaikkan sampai tingkat penggunaan optimal. Penyuluhan juga diperluas. Langkah-langkah tadi tidak hanya ditujukan untuk tanaman padi akan tetapi juga untuk tanaman palawija.

Usaha lain yang penting dalam pembangunan pertanian ini —juga untuk mempertegas asas keadilan— adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatur pemilikan, penguasaan minimal dan maksimal atas tanah serta masalah-masalah yang menyangkut pembukaan tanah baru. Seluruh kegiatan ini ditujukan pula dan disesuaikan dengan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang terpadu.

Karena tujuan pembangunan adalah juga untuk terus memperbaiki mutu kehidupan, maka mutu panganpun terus diperbaiki agar menghasilkan perbaikan mutu gizi makanan rakyat, yang berarti juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka ini akan dikembangkan pola konsumsi yang tidak hanya tergantung pada beras.

Unsur penting lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pemerataan dalam memenuhi kebutuhan perumahan, ialah rumah yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu pembangunan perumahan yang harganya terjangkau oleh rakyat banyak akan terus diperbanyak. Untuk menunjang pembangunan perumahan akan ditingkatkan produksi bahan-bahan bangunan murah secara massal dan terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia. Dengan demikian kegiatan pembangunan perumahan sekaligus akan memperluas kesempatan kerja. Perkembangan perumahan ini akan diiringi dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan, perbaikan kampung dan pedesaan, yang besar sekali pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan harapan dan cita-cita rakyat banyak. Dengan lebih

meningkatkan lagi sarana serta sistim pendidikan maka dalam REPELITA III akan dapat dilaksanakan cita-cita nasional yang sejak lama diidam-idamkan, yakni adanya kewajiban belajar.

Langkah ini adalah penting sekali dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Perhatian utama akan dicurahkan pada anak-anak usia sekolah dasar, khususnya di pedesaan dan di kota-kota dengan penduduk berpenghasilan rendah. Pada akhir REPELITA III nanti diharapkan semua anak usia 7 — 12 akan tertampung di sekolah-sekolah dasar. Ini merupakan langkah sangat penting, sebab — insya Allah — untuk pertama kali sejak Indonesia Merdeka idam-idaman ini dapat terwujud. Ini juga menyadarkan kita betapa besar tantangan bagi bangsa yang merdeka, betapa diminta kesabaran dan kerja keras kita semua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk membangun sekolah dasar menurut persyaratan yang ada, pendidikan dilaksanakan melalui Sekolah Kecil. Pada sekolah ini seorang guru memberikan pelajaran terhadap murid-murid yang tingkat pendidikannya berbeda-beda. Murid-murid tersebut berada dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan cara ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan sekolah dasar dapat disebarakan hingga ke daerah-daerah terpencil di mana jumlah anak-anak usia SD tidak mencukupi untuk membangun sebuah SD menurut ukuran yang biasa berlaku. Usaha lain untuk pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan ditempuh melalui program kerja dan belajar atau "Program Kejar", yang khusus diarahkan untuk mereka yang di luar sekolah dengan memberi pengetahuan dasar, cara berpikir dan ketrampilan, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sehari-hari. Di desa-desa "Program Kejar" ini dikaitkan dengan program pemberantasan buta huruf gaya baru, yaitu pemberantasan buta aksara latin dan angka, buta Bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.

Kesempatan belajar juga diperluas pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dengan memperbesar daya

tampung sekolah-sekolah tersebut. Di samping terus memperbanyak gedung-gedung sekolah dan ruang belajar, maka untuk sekolah lanjutan tingkat pertama misalnya, akan dikembangkan "SMP Terbuka". Di sini, mereka yang telah lulus sekolah dasar, tetapi karena satu dan lain hal tidak dapat meneruskan pendidikan di SMP di sekitarnya, akan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk tingkat pendidikan tinggi misalnya, juga akan dikembangkan program guna memperbesar daya tampung perguruan tinggi terhadap lulusan sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kesempatan belajar juga diperluas dan diratakan dengan memperhatikan mereka yang tidak memperoleh kesempatan untuk bersekolah atau putus sekolah, dengan memberi pengetahuan dan ketrampilan kepada mereka.

Perluasan kesempatan belajar tadi akan dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan menengah peningkatan mutu pendidikan ditekankan pada usaha memperkuat pengetahuan dasar yakni bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial. Pendidikan Pancasila – termasuk pendidikan moral Pancasila – yang telah dimasukkan dalam kurikulum akan disesuaikan dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Untuk memantapkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dan sistim pendidikan dan kebudayaan nasional ini, maka Pemerintah telah membentuk sebuah komisi yang ditugasi untuk mengumpulkan bahan-bahan serta menyampaikan saran pertimbangan kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan tersebut. Bahan-bahan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan RUU Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Pemerintah bermaksud untuk secepatnya dalam REPELITA III ini dapat dihasilkan Undang-undang Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang akan dapat menjadi landasan hukum baru dalam membina dan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan kita.

Saudara Ketua yang terhormat, Sidang yang mulia;

Dalam kesempatan ini saya ingin menambah penjelasan tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan warisan dan kekayaan rokhaniah rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja. Akan tetapi kitapun menyadari bahwa di dalam pertumbuhannya pernah terjadi satu dua aliran Kepercayaan yang berkembang tidak selaras dengan landasan falsafah Negara kita. Dalam pada itu kitapun menyadari bahwa perkembangan Kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan sampai mengarah pada pembentukan agama baru. Oleh karenanya pembinaan-Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa kita. Dalam pembinaan budi luhur itu jelas tercakup pembinaan sikap taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan rasa hormat terhadap agama yang dianut para penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makin kuatlah rasa keagamaan mereka. Sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sidang Dewan yang mulia;

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga mempunyai arti yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat. Pemerataan pelayanan kesehatan terutama ditujukan kepada rakyat desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah. Dalam hubungan ini diusahakan untuk lebih mendekatkan lagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Usaha ke arah ini memang telah kita

laksanakan, sehingga dalam REPELITA II sekarang ini, di setiap kecamatan telah ada sebuah Puskesmas. Ini sungguh merupakan kemajuan besar dalam usaha memperbaiki kesejahteraan umum, namun ini tetap baru merupakan langkah-langkah permulaan.

Dalam REPELITA III fungsi dan luas jangkauan pelayanan Puskesmas akan makin kita tingkatkan lagi. Untuk itu Kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 30.000 orang atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas akan kita tambah dengan Puskesmas baru. Langkah lainnya adalah akan kita adakan Puskesmas-puskesmas Pembantu di desa-desa. Pendeknya, kita akan terus berusaha agar pelayanan kesehatan masyarakat makin hari makin baik. Untuk itulah maka di Kabupaten-kabupaten atau Kotamadya yang belum memiliki Rumah Sakit Umum akan dibangun Rumah Sakit Umum yang baru. Salah satu hal yang erat pula hubungannya dengan peningkatan kesehatan rakyat adalah penyediaan air bersih yang ternyata sangat besar peranannya dalam pengembangan kesehatan lingkungan. dengan perhatian istimewa pada daerah-daerah yang sulit memperoleh air bersih dan daerah-daerah di mana wabah penyakit kolera dan penyakit-penyakit rakyat lainnya cukup tinggi.

Sidang Dewan yang terhormat;

Suatu unsur pemerataan yang sangat penting adalah pemerataan pembagian pendapatan. Untuk ini perhatian khusus akan dicurahkan pada usaha usaha guna mempertinggi penghasilan kelompok-kelompok masyarakat dengan mata pencaharian yang penghasilannya sangat rendah. Di samping kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat khusus, segala kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan juga diarahkan agar golongan yang berpenghasilan rendah ini terangkat hidupnya. Peningkatan pendapatan rakyat yang tergolong sangat miskin ini merupakan bagian yang penting dari usaha besar kita untuk mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.

Sesungguhnya adalah ada hubungan yang erat sekali antara pemerataan pembagian pendapatan dan langkah-langkah untuk

pemerataan kesempatan kerja. Kebanyakan di antara rakyat yang tergolong sangat miskin adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak bekerja secara penuh. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat tergantung kepada tersedianya kesempatan kerja. Sehubungan dengan itu maka pemerataan kesempatan kerja merupakan rangkaian langkah-langkah yang sangat menentukan dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Karena itu pula perluasan kesempatan kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang menyeluruh, meliputi semua kegiatan sektoral maupun regional. Dalam rangka ini --seperti halnya dalam REPELITA-REPELITA sebelumnya-- kebijaksanaan-kebijaksanaan umum di bidang keuangan perpajakan, teknologi, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sektoral seperti industri, pertanian dan sebagainya ditujukan untuk makin mendorong pertumbuhan ekonomi kita yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Demikian pula halnya dengan pembangunan regional, terutama di tingkat kecamatan dan desa akan kita arahkan agar dapat menampung tenaga kerja secara produktif yang sebanyak mungkin. Di samping semuanya itu maka program-program pembangunan yang khusus untuk memperluas kesempatan kerja, seperti proyek padat karya, akan terus ditingkatkan.

Asas pemerataan harus tercermin pula dalam pengembangan dunia usaha. Pemerataan kesempatan berusaha antara lain akan ditingkatkan melalui berbagai program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas usahanya. Golongan ekonomi lemah akan terus dibantu, dibimbing dan diperbesar kemampuannya.

Dalam pada itu modal asing tetap kita beri kesempatan untuk menyertai kita dalam usaha-usaha pembangunan yang makin besar ini, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk menggarap bidang-bidang yang belum dapat diusahakan oleh pengusaha nasional. Untuk kepentingan nasional, dan untuk mempertahankan kedaulatan kita di lapangan ekonomi, maka penanaman modal asing diwajibkan membentuk usaha patungan dengan pengusaha nasional.

Bagi penanaman modal dalam negeri kita akan menentukan langkah-langkah sehingga terbuka kesempatan berusaha yang lebih besar kepada pengusaha nasional Indonesia dalam mengembangkan kegiatannya. Selanjutnya pemerataan kesempatan berusaha tercermin pula dalam langkah-langkah untuk membangun sektor koperasi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Selama REPELITA III nanti BUUD/KUD yang sekarang telah ribuan jumlahnya, akan kita konsolidasikan menjadi Koperasi yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat desa, yang pengurusnya dipilih oleh dan di antara anggotanya sendiri serta memiliki berbagai unit usaha sesuai dengan bidang kegiatan yang ada di desa masing-masing. Agar koperasi itu dapat berkembang menjadi salah satu soko guru ekonomi nasional yang kuat dan mampu menjadi wadah ekonomi rakyat, maka pengurus koperasi yang bersangkutan mengangkat tenaga-tenaga yang ahli, sebagai manajer koperasi.

Para Anggota Dewan yang terhormat;

Dalam rangka mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional maka diusahakan pemerataan kesempatan berpartisipasi sepenuhnya bagi generasi muda dalam kegiatan pembangunan. Untuk itu, melalui kelompok kerja produktif dan berbagai kegiatan lainnya, generasi muda akan dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya disusun suatu kebijaksanaan nasional tentang kepemudaan secara menyeluruh dan terpadu. Demikian pula sebagai pencerminan daripada hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan kaum pria, maka diusahakan pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi kaum wanita. Untuk itu akan ditingkatkan pendidikan dan ketrampilan wanita terutama di daerah pedesaan, antara lain, melalui pendidikan informal dan pendidikan ketrampilan lainnya, termasuk pendidikan kewiraswastan. Untuk ini diusahakan membentuk kader-kader wanita bagi pembangunan desa. Berbagai kegiatan akan dikembangkan untuk memperbanyak kegiatan produktif, terutama bagi wanita

yang ekonominya lemah. Dengan demikian kaum wanita akan bertambah pula kemampuannya untuk memperoleh penghasilan.

Asas pemerataan tercermin pula dalam penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia dengan mengutamakan daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya. Jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan akan makin disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga benar-benar bermanfaat dan cukup strategis untuk memecahkan masalah-masalah mendesak di daerah yang bersangkutan. Dalam pada itu pertumbuhan antar daerah akan makin diserasikan. Dalam rangka ini sangat penting arti transmigrasi, bukan saja sebagai cara untuk memecahkan kepadatan penduduk di satu daerah, akan tetapi juga untuk menambah sumber daya manusia di daerah lain yang memerlukan. Dalam pada itu sumber-sumber keuangan baru untuk makin membangkitkan pembangunan daerah akan terus dijalin secara wajar, termasuk pula penyempurnaan berbagai bantuan pembangunan. Demikian pula aparatur di daerah, baik vertikal maupun otonom terus diperbaiki.

Pembangunan desa akan makin diperhatikan dengan menempuh cara-cara yang lebih terpadu, antara lain dengan tujuan untuk menggairahkan masyarakat membangun dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Inpres Desa akan diarahkan untuk menumbuhkan gerak masyarakat membangun desanya, dalam hubungan koordinasi yang lebih mantap pada tingkat Kecamatan. Kota-kota sedang dan kota-kota kecil terus dikembangkan, agar dapat menjadi pengumpul dan penyalur hasil-hasil pertanian dan kebutuhan pokok lainnya, yang sekaligus dapat mengurangi serbuan urbanisasi ke kota-kota besar.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan manusia seutuhnya. Ini berarti kita berusaha untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan manusia juga secara utuh, tidak saja kebutuhan-kebutuhan fisik kebendaan akan tetapi juga tuntutan-tuntutan hati nurani. Tuntutan hati nurani yang tidak ada henti-hentinya ialah terwujudnya keadilan, khususnya keadilan di lapangan hukum. Karena itulah dalam usaha kita agar pembangunan makin menyentuh segi-segi yang dalam, agar asas pemerataan menuju keadilan dalam TRILOGI Pembangunan makin terwujud, maka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum juga harus kita pertegas pelaksanaannya. Ini antara lain akan kita lakukan dengan mengusahakan penyelesaian perkara-perkara di pengadilan-pengadilan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya. Untuk itu perlu diadakan peraturan-peraturan hukum dan penertiban penertiban hukum, baik yang menyangkut tata cara penyelesaian perkara, maupun menambah badan-badan pengadilan dan tenaga-tenaga penegak hukum dan keadilan yang diperlukan.

Disamping itu perhatian khusus juga akan diberikan kepada bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu.

Demikian pula akan diusahakan terbentuknya pengadilan administrasi yang dapat menampung dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/petugas aparatur negara, maupun untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pegawai negeri.

Dalam pada itu pelaksanaan hukum yang tegas yang dikenakan terhadap setiap pelanggar, perlu kita tingkatkan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta untuk menumbuhkan kewibawaan dan kepercayaan terhadap pengadilan dan aparat hukum pada umumnya oleh masyarakat.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air,

Demikianlah delapan jalur besar yang akan bersama-sama kita tempuh agar kita semua lebih merasakan arti keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Dalam pada itu kita sadar bahwa berhasilnya pemerataan dan peningkatan pembangunan akan ditentukan pula oleh laju

pertambahan penduduk. Dalam lima tahun mendatang ini jumlah penduduk akan sangat ditentukan oleh perkembangan masa lampau, antara lain oleh pelaksanaan program keluarga berencana. Adalah patut kita syukuri karena kita telah melaksanakan program keluarga berencana sejak beberapa tahun yang lalu. Hasilnya cukup menggembirakan, namun untuk tahun-tahun mendatang program ini masih harus ditingkatkan lagi. Selama REPELITA II jumlah penduduk kita meningkat dengan rata-rata 2,3% setahun. Ini adalah suatu kenaikan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan sekiranya kita tidak melaksanakan program keluarga berencana tadi. Dengan meneruskan dan meningkatkan apa yang kita lakukan sekarang dengan program keluarga berencana, maka laju pertumbuhan penduduk akan dapat kita turunkan lagi menjadi sekitar rata-rata 2% setahun selama REPELITA III. Ini berarti jumlah penduduk yang dewasa ini sekitar 137 juta orang akan meningkat menjadi sekitar 151 juta orang pada akhir REPELITA III.

Pembangunan jelas memerlukan dana. Dana ini tidak saja harus tersedia akan tetapi haruslah dapat segera digunakan. Tanpa dana, pembangunan adalah suatu kemustahilan. Jika banyak masalah sosial yang belum dapat kita tanggulangi, maka hal itu bukanlah karena kita tidak tahu atau tidak mau menangani masalah-masalah tersebut, juga bukan karena kita kekurangan gagasan atau pikiran, akan tetapi justru karena keterbatasan dana itu tadi. Makin besar dana yang dapat kita himpun maka akan makin lincah gerak kiprah pembangunan kita. Namun haruslah disadari bahwa dana yang kita perlukan tidak akan turun dari langit. Dana itu hanya akan terhimpun apabila kita semua bekerja keras untuk meningkatkan produksi nasional. Malahan justru untuk menundukkan tantangan besar yang masih harus kita hadapi itu, kita tidak cukup hanya menaikkan produksi nasional, akan tetapi produksi nasional itu harus dapat kita tingkatkan dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada potensi pengembangan sumber-sumber alam yang ada dan tersedianya tenaga yang trampil. Juga sangat tergantung pada barang-barang modal dan dana-dana yang tersedia. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan di berbagai sektor --terutama sektor pertanian, pertambangan dan industri serta tenaga terdidik-- maka diperkirakan akan tercapai laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% setahun selama REPELITA III nanti.

Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2% -- seperti yang tadi telah saya sebut -- maka produksi nasional nyata per kapita akan meningkat dengan sekitar 24% selama lima tahun mendatang.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Kita juga menyadari, bahwa keadilan yang benar-benar mempunyai arti, keadilan yang benar-benar meninggikan martabat kita adalah keadilan dalam kemajuan. Karena itu usaha kita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak boleh kendor.

Jelaslah, bahwa seperti yang digariskan dalam GBHN, maka dalam gerak pembangunan itu terkandung pula usaha-usaha untuk makin membuat seimbang struktur ekonomi kita. Keseimbangan struktur ekonomi yang lebih sehat ini sangat kita perlukan agar kita dapat meletakkan landasan yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan selanjutnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya, ialah untuk makin memperkuat ketahanan ekonomi kita. Untuk itu kita harus berusaha keras agar laju pertumbuhan sektor-sektor di luar pertanian lebih besar dari laju pertumbuhan sektor pertanian. Sedangkan sektor pertanian itu sendiri --antara lain untuk mencukupi kebutuhan pangan-- laju pertumbuhannya juga harus kita tingkatkan.

Dalam REPELITA III kita berusaha untuk mencapai laju pertumbuhan rill sebesar 6,5% setahun, yang sekaligus serasi dengan tujuan perubahan struktur ekonomi yang telah saya kemukakan tadi. Untuk itu sektor-sektor industri akan kita tingkatkan dengan sekitar 11,0%, sektor bangunan dengan

sekitar 9,0%, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan sekitar 10,0% dan sektor-sektor lainnya di luar pertanian dan pertambangan dengan sekitar 8,0% setahun. Dalam pada itu sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan dapat meningkat dengan sekitar dua kali laju pertumbuhan penduduk atau masing-masing sekitar 3,5% dan 4% setahun

Berdasarkan laju-laju pertumbuhan tadi maka peranan sektor pertanian akan menurun : dari sekitar 31% dewasa ini menjadi sekitar 27% dalam tahun 1983/'84 nanti. Sedangkan peranan sektor-sektor di luar pertanian akan meningkat dari 69% menjadi 73%. Dengan itu kita melangkah lebih maju lagi dalam usaha kita untuk lebih membuat seimbang struktur ekonomi kita.

Khusus untuk sektor industri yang akan mempunyai peranan yang besar dalam struktur ekonomi kita, dalam REPELITA III nanti akan didorong tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.

Seperti telah saya kemukakan tadi, setiap kegiatan pembangunan membutuhkan dana-dana dengan segera bagi pelaksanaannya dan untuk dapat mengerahkan dana-dana tersebut produksi nasional harus ditingkatkan. Di lain pihak tidak semua kegiatan pembangunan dapat segera meningkatkan produksi. Ada yang hanya mempunyai pengaruh tidak langsung, ada yang baru setelah beberapa tahun dapat mempengaruhi produksi. Dan hanya sebagian saja yang segera dapat meningkatkan produksi. Hal ini berarti bahwa produksi nasional hanya dapat ditingkatkan kalau cukup tersedia dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat segera menunjang pertumbuhan produksi tersebut.

Dengan demikian maka masalah utama yang sangat penting adalah bagaimana memilih pola investasi sehingga kapasitas membangun di kemudian hari dapat semakin meningkat, sedang setiap kali juga selalu tersedia dana dana yang cukup bagi pembiayaan pembangunan. Jumlah investasi yang diperlukan cenderung meningkat apabila pola investasi makin bergeser kepada investasi-investasi yang pengaruhnya pada produksi

bersifat tidak langsung atau yang mempunyai masa tenggang waktu produksi yang panjang. Di lain pihak investasi dapat efisien apabila dapat dipilih cara-cara produksi yang tidak memerlukan biaya yang besar, menghilangkan pemborosan dan memperlancar pelaksanaan proyek.

Di dalam pelaksanaan REPELITA III nanti akan diadakan penelitian yang cermat atas pola investasi dan pemilihan teknologi yang tepat sehingga produksi nasional dapat meningkat dengan biaya investasi yang sekecil mungkin demi tercapainya sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% setahun serta sasaran-sasaran nasional lainnya, termasuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kemantapan stabilitas ekonomi.

Sebagai suatu prasyarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan maka stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga-harga akan terus dimantapkan. Laju inflasi yang akhir-akhir ini sangat membaik akan terus dikendalikan sehingga bergerak di sekitar laju inflasi dunia. Untuk itu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang selama REPELITA II telah berjalan baik seperti anggaran berimbang yang dinamis, kebijaksanaan pengadaan bahan-bahan kebutuhan pokok, kebijaksanaan moneter serta kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi lainnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dengan demikian maka sebagai persentase terhadap produksi nasional, investasi diperkirakan meningkat menjadi sekitar rata-rata 21% setiap tahun dalam REPELITA III.

Adalah tekad kita bahwa pembangunan itu akan kita pikul dengan kekuatan sendiri. Ini adalah wajar dan adil. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu maka sebagian besar investasi pembangunan akan kita kerahkan dari dalam negeri, sedangkan sisanya dari luar negeri. Dengan mengerahkan segala kemampuan itu, maka dalam REPELITA III tabungan dalam negeri diperkirakan berjumlah sekitar rata-rata 17% setiap tahun. Seperti diketahui tabungan dalam negeri ini terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa secara rata-

rata tabungan dalam negeri akan mampu membiayai sekitar 81% dari keseluruhan investasi.

Sebagian dari dana investasi merupakan dana investasi Pemerintah yang dikerahkan dan disalurkan melalui anggaran pembangunan negara, yaitu sebesar sekitar 40 — 44% dari keseluruhan investasi. Sisanya adalah dana investasi masyarakat, termasuk tabungan perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan daerah dan pemerintah daerah baik yang dikerahkan melalui lembaga-lembaga keuangan maupun tabungan masyarakat yang langsung diinvestasikan sendiri.

Investasi Pemerintah Pusat di dalam REPELITA III nanti akan memegang peranan yang lebih kecil jika dibanding dengan REPELITA II. Hal ini disebabkan terutama karena penerimaan minyak tidak akan mengalami banyak perubahan, berhubung situasi pasaran minyak dan keadaan ekonomi dunia. Seperti telah dimaklumi selama REPELITA II ini penerimaan minyak itu merupakan 55% dari penerimaan negara. Ini merupakan tantangan yang harus kita tundukkan. Jawaban yang harus kita berikan adalah dengan meningkatkan penerimaan di satu pihak dan melakukan penghematan di lain pihak. Untuk itu kita akan berusaha keras guna menaikkan penerimaan-penerimaan non minyak. Untuk itu Pula kita hams melaksanakan penghematan baik pada pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan bersamaan dengan itu Pemerintah akan terus menciptakan suasana dan memberi dorongan kepada pihak swasta, perusahaan negara, perusahaan daerah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan mobilisasi dari dana-dananya sendiri sehingga dapat ikut secara lebih aktif di dalam pelaksanaan REPELITA III.

Setiap dana yang tersedia harus dikerahkan pada kepentingan pembangunan dan sama sekali tidak boleh diboroskan. Karma itu pengeluaran pembangunan Pemerintah akan diarahkan kepada proyek-proyek dengan prioritas tinggi; terutama untuk membangun prasarana sosial dan prasarana fisik, serta

pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Penerimaan negara diperkirakan akan terus meningkat secara riil selama REPELITA III akan tetapi tidak secepat laju pertumbuhan yang dicapai selama REPELITA II. Penerimaan minyak diperkirakan tidak meningkat atau meningkat dengan sedikit sekali oleh karena situasi produksi dan pemasaran dunia dan prospek perkembangan harga yang kurang memungkinkannya. Di lain pihak penerimaan dari gas alam cair (LNG) akan meningkat dengan pesat dengan prospek pemasaran serta prospek produksi yang baik di lapangan gas Arun dan Badak.

Penerimaan negara di luar minyak akan lebih ditingkatkan lagi dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, memperbaiki aparatur perpajakan dan meningkatkan jumlah penghasilan yang terkena pajak, sehingga jumlah penerimaan tersebut, yang dewasa ini adalah lebih kecil dari penerimaan minyak dan LNG, diperkirakan akan melampaui penerimaan minyak dan LNG selama REPELITA III.

Penerimaan pajak langsung di luar minyak terutama pajak pendapatan, pajak kekayaan, IPEDA, pajak perseroan dan lain-lain akan ditingkatkan berdasarkan tarif yang progresif sesuai dengan asas keadilan, dalam rangka meratakan pendapatan masyarakat, mendorong pola hidup sederhana dan mendorong kegiatan pembangunan pada umumnya. Khususnya penerimaan pajak, baik pajak pendapatan maupun pajak kekayaan dari golongan yang berpendapatan tinggi akan lebih ditertibkan agar mereka benar-benar menyumbang kepada pembangunan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan asas keadilan. Dengan demikian maka peranan pajak langsung diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 41% dalam REPELITA III.

Untuk dapat menciptakan tabungan Pemerintah yang semakin meningkat akan terus diadakan penghematan-penghematan di dalam pengeluaran rutin, termasuk belanja barang serta pengurangan subsidi-subsidi tanpa mengorbankan

mutu dan jumlah pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan kelancaran roda pemerintahan.

Di samping tabungan Pemerintah, tabungan masyarakat akan lebih digiatkan lagi terutama tabungan yang dikerahkan melalui lembaga-lembaga keuangan baik lembaga-lembaga perbankan maupun lembaga lembaga keuangan non bank. Deposito berjangka dan tabungan yang berasal dari para penabung kecil akan terus digiatkan dengan pemberian bunga riil yang menarik sesuai dengan kemantapan stabilitas ekonomi. Pasar modal akan digiatkan dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjual sahamnya di bursa dalam rangka pemerataan pemilikan maupun mobilisasi dana-dana pembangunan.

Kebijaksanaan perkreditan akan semakin diarahkan kepada kebutuhan pembangunan khususnya kepada kebutuhan dunia usaha dengan beban biaya yang sesuai dengan kemantapan stabilitas ekonomi. Dalam rangka usaha-usaha pemerataan pembangunan, kebijaksanaan penyediaan dana perkreditan khusus bagi golongan ekonomi lemah akan diteruskan, ditingkatkan dan dilancarkan dengan beban yang seringannya mungkin.

Di samping dana-dana dalam bentuk rupiah, kita akan terus membutuhkan pula dana-dana dalam bentuk devisa untuk mengimpor barang-barang dan jasa khususnya barang-barang modal yang belum cukup dihasilkan di dalam negeri. Sumber utama hasil devisa adalah ekspor. Oleh karena itu ekspor akan lebih ditingkatkan, baik ekspor minyak dan LNG maupun ekspor di luar minyak bumi.

Produksi dan ekspor minyak—seperti tadi telah saya singgung— akan ditingkatkan melalui peningkatan eksplorasi dan penghematan konsumsi dalam negeri dalam rangka peragaman sumber sumber energi. Dengan usaha-usaha tadi ekspor minyak dan LNG diperkirakan masih tidak akan besar peningkatannya. Hal ini mengharuskan kita untuk lebih meningkatkan lagi ekspor non minyak, baik ekspor komoditi-komoditi tradisional maupun ekspor hasil-hasil industri, terutama yang

produksinya bersifat padat karya. Peningkatan ekspor non minyak akan dilaksanakan melalui kebijaksanaan terpadu yang meliputi bidang produksi, bidang pemasaran, bidang perkreditan, penghapusan hambatan-hambatan, dan pemberian rangsangan fiskal dalam rangka menekan biaya produksi, meningkatkan jumlah dan mutu ekspor serta meningkatkan daya saing barang-barang tersebut di pasaran dunia.

Keseluruhan keadaan tersebut mengandung arti bahwa dana-dana yang tersedia untuk impor tidak akan banyak meningkat, sehingga mengharuskan kita untuk berusaha lebih keras agar sebanyak mungkin memenuhi kebutuhan kita dengan produksi dalam negeri, khususnya kebutuhan akan barang-barang konsumsi dan bahan baku, sehingga impor lebih diarahkan kepada barang-barang modal yang belum dapat kita hasilkan sendiri.

Dengan demikian maka REPELITA III secara singkat memberikan gambaran kerangka sebagai berikut: Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 2% setahun, laju pertumbuhan ekonomi dalam arti riil sekitar 6,5% setahun, laju pertumbuhan pendapatan per kapita secara riil 24% dalam lima tahun, laju pertumbuhan sektor pertanian sekitar 3,5% dan sektor industri sekitar 11% setahun, dana investasi berkisar sekitar 21% dari produksi nasional, tabungan dalam negeri sekitar 17% dari produksi nasional atau 81% dari dana investasi.

Juga tampak jelas bahwa ekspor minyak bumi —yang dalam REPELITA II telah naik cukup tinggi— dalam REPELITA III nanti tidak akan meningkat dengan cepat, ini berarti adanya keharusan usaha untuk makin meningkatkan ekspor di luar minyak bumi serta lebih meningkatkan lagi penerimaan negara dari sumber-sumber lain.

Saudara Ketua yang terhormat;

Untuk melaksanakan dan mencapai Sapta Krida seperti yang telah saya bentangkan tadi, maka saya membentuk Kabinet Pembangunan III. Jika dibanding dengan Kabinet-kabinet sebelumnya, maka Kabinet Pembangunan ini

mempunyai tekanan yang lebih besar pada fungsi koordinasi, baik pada tingkat penentuan kebijaksanaan, pada tingkat pelaksanaan dan pada segi pengawasan. Karena itulah saya adakan Menteri Koordinator, yang masing-masing mengkoordinasikan bidang politik dan keamanan; bidang ekonomi, keuangan dan industri; serta bidang kesejahteraan rakyat. Saya juga mengangkat Menteri-menteri Negara, yang mempunyai bidang tugas tertentu, yang tidak tertampung di dalam atau melampaui bidang tugas sesuatu Departemen, yang mendapatkan pula prioritas dalam penanganannya. Menteri-menteri Negara ini masing-masing bertugas :

- menangani penertiban dan pendayagunaan aparatur;
- mengendalikan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup;
- menangani masalah penelitian dan teknologi;
- menangani masalah-masalah administrasi negara serta administrasi dan keuangan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen.

Sedangkan Menteri-menteri Negara yang memimpin Departemen tetap berjumlah 17 dengan beberapa perubahan bidang tugas, ialah: koperasi dimasukkan dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, sehingga Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sekarang menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pertambangan diperluas menjadi Departemen Pertambangan dan Energi dengan mengeluarkan tenaga listrik dari Departemen PUTL yang lama, sehingga sekarang menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Dalam pada itu saya telah mengangkat beberapa Menteri Muda yang tugasnya mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan dari kebijaksanaan yang digariskan dalam bidang tertentu; yang dalam REPELITA III nanti benar-benar diharapkan dapat dicapai. Bidang-bidang itu adalah: peningkatan produksi pangan, koperasi, transmigrasi, perumahan rakyat, pembinaan generasi muda dan peningkatan peranan wanita.

Perlu saya tegaskan di sini, bahwa sesuai dengan petunjuk

Undang-Undang Dasar maka para Menteri --baik Menteri Koordinator, Menteri Negara, maupun Menteri Muda-- adalah pembantu Presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Hanya tugas dan fungsinya yang berbeda. Dengan komposisi dan pembagian tugas yang demikian itu diharapkan fungsi koordinasi baik dalam penentuan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan serta fungsi kontrol akan dapat berjalan lebih efektif, sehingga hasil-hasilnya diharapkan dapat lebih optimal.

Untuk mengintensifkan dan mengefektifkan fungsi-fungsi koordinasi baik dalam penentuan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan, maka telah digariskan mekanisme kerja Kabinet, dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat Kabinet, dalam lingkungan Menko, antara Menteri dan Menteri Muda.

Di tingkat Kabinet, maka untuk mempercepat pengambilan keputusan mengenai berbagai kebijaksanaan dan masalah, maka di sawing Sidang Kabinet Paripurna, saya juga mengadakan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Politik dan Keamanan, Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, serta Sidang Kabinet Terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan di lingkungan Menko, para Menko dapat mengadakan koordinasi untuk mengkoordinasikan masalah masalah yang menyangkut berbagai Departemen agar pelaksanaannya oleh masing-masing Departemen dapat lebih terpadu dan lancar.

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar - -ialah bahwa : Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan-- maka dalam melaksanakan tugasnya para Menteri juga harus mengatasi segala paham golongan dan perseorangan tadi. Karena itu pula para Menteri yang duduk dalam Kabinet tidak mewakili sesuatu golongan atau berat sebelah mewakili sesuatu golongan yang manapun. Pengertian dasar ini penting untuk kita tegaskan berulang kali pada diri kita sendiri, karena memang demikianlah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, yang menempatkan persatuan Indonesia sebagai asas yang utama. Pengertian dasar ini perlu kita camkan bersama-

sama sebab kita memang ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar ini menurut aksara maupun semangatnya.

Mengenai pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden, dapatlah saya jelaskan kepada Dewan yang terhormat, bahwa setelah saya berembug dengan Saudara Wakil Presiden, maka ditentukanlah tugas-tugas Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden. Ini merupakan tugas yang bersifat umum. Di samping itu ada tugas khusus yang dilaksanakan oleh Wakil Presiden, ialah terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaan pengawasan pembangunan, yang dalam REPELITA III nanti akan makin meningkat dan makin jelas arah dan sasaran-sasarannya dalam rangka menuju sasaran pembangunan jangka panjang.

Demikianlah, Saudara Ketua yang terhormat, saya telah menjelaskan pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam lima tahun mendatang termasuk didalamnya pokok-pokok kerangka REPELITA III yang ingin kita capai.

Pemerintah sekarang sedang menyusun keseluruhan REPELITA III secara lengkap. Dan untuk itu saya minta sumbangan pikiran dan pandangan dari seluruh lapisan masyarakat kita, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Dengan demikian saya berharap agar REPELITA III itu benar-benar menampung segala aspirasi, pikiran dan keinginan-keinginan rakyat. Tentu saja tidak semua keinginan harus terpenuhi dan tidak semua harapan akan terkabul. Akan tetapi, setidaknya, kita telah berusaha ke arah itu. Dengan jalan ini kita berarti terus berusaha untuk memberi isi yang lebih besar pada kehidupan demokrasi kita, kita memberi bobot yang lebih dalam pada kehidupan demokrasi itu. Lebih-lebih karena saya tahu bahwa banyak keinginan dan harapan-harapan rakyat yang tidak terucapkan.

Saya akan memegang teguh petunjuk GBHN, bahwa pelaksanaan pola umum pembangunan lima tahun yang digariskan dalam Ketetapan MPR No. IV Tahun 1978 itu dilakukan oleh

Presiden selaku Mandataris MPR. Saya juga akan melaksanakan petunjuk GBHN, bahwa dalam menyusun REPELITA III Presiden mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan yang terhormat. Dan sekarang, melalui Saudara Ketua yang terhormat, saya minta saran-saran Dewan dalam menyusun REPELITA III itu.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air,

REPELITA III merupakan langkah lanjutan yang akan kita tempuh bersama-sama untuk mendekati wujud masyarakat yang kita cita-citakan.

Dalam lima tahun mendatang kita mempunyai kemampuan untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu dalam lima tahun mendatang kita mempunyai kemauan yang tidak tergoyahkan untuk pemerataan pembangunan.

Kita jelas mempunyai harapan dalam lima tahun mendatang itu. Akan tetapi kita sadar bahwa masa depan itu harus kita masuki dengan rasa tanggungjawab dan kewaspadaan.

Masa depan itu jelas bukan seindah malam bukan purnama. Masa depan itu tetap masa perjuangan mengarungi lautan pembangunan.

Seperti telah saya isyaratkan tadi, sumber-sumber dana kita tetap terbatas, lebih-lebih jika kita bandingkan dengan tugas-tugas besar yang harus kita kerjakan. Karena itu satu-satunya jawaban yang hams kita berikan adalah dengan mengarahkan segala dana yang ada untuk tujuan-tujuan pembangunan, baik dana yang ada pada Pemerintah maupun dana yang tersedia dalam masyarakat. Ini berarti kita harus lebih berhemat, tidak hidup boros dan tidak menghamburkan dana yang ada untuk hal-hal yang tidak perlu.

Semua kita harus menyadari bahwa tantangan-tantangan yang harus kita jawab makin besar dan masalah-masalah yang harus kita selesaikan makin bertambah. Dalam keadaan seperti itu, kita semua dituntut untuk secara dewasa dapat belajar dari pengalaman masa lampau: belajar dari keberhasilan-keberhasilan

yang kita capai, dan juga terutama belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Kita pun dituntut untuk secara arif melihat arah dan kemungkinan masa depan kita dengan berbagai tantangan dan Masalahnya yang harus kita hadapi.

Memang, masa lampau telah lewat dan berlalu. Kita tak mungkin menariknya kembali. Disukai atau tidak, masa lampau dengan berbagai peristiwa dan kejadian, mengembirakan maupun mengecewakan, sudah merupakan bagian dari sejarah bangsa kita. Kita tak mungkin mengingkarinya. Kalau kita ingkari, hal itu berarti mengingkari sejarah kita sendiri. Yang lebih penting bagi kita, bukanlah membanggakan keberhasilan atau sebaliknya meratapi kegagalan kita. Yang penting bagi kita adalah, sekali lagi, bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah bangsa kita itu agar dalam melanjutkan perjalanan selanjutnya kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, agar kita mampu menebus kegagalan-kegagalan yang pernah dialami --yang ikut mengisi lembaran masa lampau kita-- dengan bekerja lebih tekun, lebih tertib dan lebih terarah. Kemampuan kita untuk bersikap dewasa dalam menanggapi berbagai kenyataan --yang jelas tidak seluruhnya mengembirakan itu-- pasti akan menghindarkan kita dari perasaan kecewa dan putus asa. Bahkan semua itu akan menjadi bahan berharga untuk melihat dan mengkaji kelemahan dan kekuatan kita, kekurangan dan kelebihan kita, yang sangat besar artinya dalam rangka mengurangi masa depan dengan segala tantangan dan masalahnya

Tantangan yang cukup besar, seperti telah saya katakan tadi, adalah pertama, proses pergantian generasi yang secara berangsur-angsur sudah mulai berjalan, dan dalam tahun-tahun mendatang akan menjadi kenyataan. Kedua, masalah pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi segenap rakyat /dan bangsa kita. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala kelangkaan dan keterbatasan kita, kita harus berjalan dengan langkah maju yang mantap menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam menghadapi proses pergantian generasi, tanggung-jawab kita tidak hanya menyangkut generasi sekarang melainkan juga generasi yang akan datang. Kita tidak ingin mewariskan ketidak pastian masa depan bagi generasi pelanjut kita. Kita tidak ingin membuat mereka bergerak dari titik awal kembali. Sudah barang tentu hal ini menuntut kita untuk tidak bersikap tergesa-gesa, ingin memetik dan menikmati buah pembangunan secepat mungkin. Kenikmatan yang kita rasakan sebagai generasi tua, justru karena kita --dengan segala jerih payah dan keprihatinan-- berusaha sekuat tenaga untuk membuat generasi setelah kita, dapat hidup lebih layak dan lebih baik dari generasi sekarang. Oleh karena itu, dengan hati yang teguh kita berusaha --lewat tahap-tahap pembangunan--meletakkan dasar-dasar yang kokoh dan mantap untuk perkembangan dan kemajuan bangsa kita di segala bidang: ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dari pengalaman perjalanan bangsa kita selama 33 tahun merdeka ini, kita harus bersyukur ke hadirat Tuhan Yang MAHAESA, sebab dengan pertolongan-Nya kita telah berhasil melampaui berbagai gejolak dan kemelut yang cukup menggoyahkan sendi-sendi negara kita, mengatasi rintangan demi rintangan yang tidak habis-habisnya, sehingga dengan modal kesetiaan kita kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa kita tetap tegak dan utuh. Karena itu, dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ini, saya mengajak segenap rakyat, untuk memajukan tekad dan menyerasikan langkah dalam usaha melanjutkan perjalanan, mengarungi masa depan kita, seraya tetap berdiri di atas garis lurus yang berpangkal pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hanya dengan kesetiaan pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 kelestarian dan keutuhan bangsa kita dapat-terpelihara.

Hanya dengan kesetiaan pada cita-cita. Proklamasi 17 Agustus 1945 Masyarakat Pancasila dapat kita wujudkan.

Semoga Allah Yang MAHAESA senantiasa memberkahi segala usaha kita.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

